



RENCANA KERJA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri merupakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri wajib membuat perencanaan dalam setiap tahunnya yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Berdasarkan Peraturan perundang-undangan, Dokumen perencanaan yang wajib dan ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai Dokumen operasional tahunan atau jangka pendek. Selanjutnya SKPD sebagai stakeholder dengan berpedoman pada RPJMD menyusun Renja.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan rencana tahunan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2019 – 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kabupaten Sampang. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini ditetapkan dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang, khususnya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai dengan Visi Bupati Kabupaten Sampang untuk periode 2019-2024khususnya pada Misi 5 : Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu.

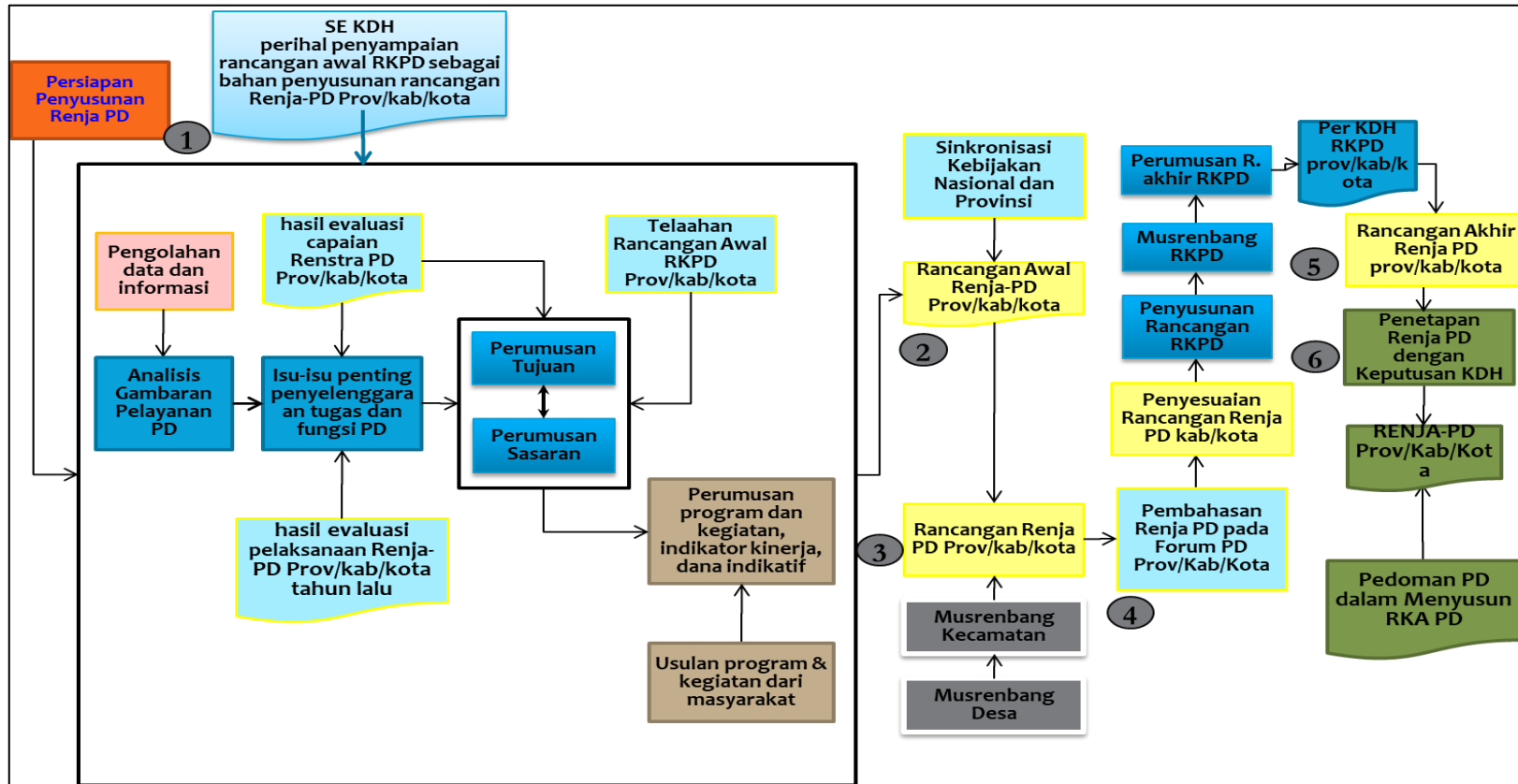
Penyusunan Renja SKPD berpedoman pada PERMENDAGRI 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Persyaratan Penyusunan RAPBD melalui tahap sebagai berikut :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrembang
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (Outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah :

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019 -2024;
27. Peraturan Bupati Sampang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
28. Peraturan Bupati Sampang Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang adalah sebagai dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 yang memuat tentang kumpulan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2023.

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Bakesbang dan Politik Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;

3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrument pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Kegiatannya.

BAB V. PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sebelum melakukan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mendukung pemcapaian target maupun hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Evaluasi kinerja didasarkan pada Indiaktor Kinerja Utama (IKU) yang merupakan penjabaran dari satu sasaran strategis Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang yaitu “ Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial Politik “

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang tahun 2023 dilakukan terhadap semua program dan yang berkaitan dengan pencapaian target Rencana Strategis Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 2.1.
Sasaran, Indikator Sasaran, Target dan Realisasi 2022
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Menurunnya Konflik Sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial Politik	100 %	30 %	85,71 %

Secara umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang telah dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab organisasi, dalam tahun 2021 pelaksanaan rencana strategis mencakup 1 (satu) sasaran strategis dari penilaian berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang diterapkan dari beberapa indikator sasaran.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renstra Bakesbang dan Politik sampai dengan Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan.

Adapun pencapaian Renstra Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang sampai dengan tahun 2022 (tahun berjalan) adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.29.
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Kabupaten Sampang

BAKESBANG DAN POLITIK KABUPATEN SAMPANG										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022 (Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 /4)
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100	92,85	100	92,85	92,85	100		
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	10	2	2	2	100	2	6	60,00
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Tahun 2022 yang disusun	5	1	1	1	100	1	3	60,00
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Tahun 2022 yang disusun	5	0	1	1	100	1	2	40,00
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Tahun 2022 yang disusun	5	1	1	1	100	1	3	60,00
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Tahun 2022 yang disusun	5	0	1	1	100	1	2	40,00
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LKPI, SAKIP LKJIP Perangkat Daerah yang disusun	15	3	3	3	100	3	9	60,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100		

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 /4)
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai selama 1 tahun	100	22	22	22	100	22	66	66,00
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang disediakan	100	0	32	32	100	32	64	40,00
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	5	2	1	1	100	1	4	80,00
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Laporan Semester / Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Laporan Semester / Semester SKPD yang	85	2	17	17	100	18	37	43,53

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 /4)
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	130	13	26	16	62	42	71	54,62
		Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	195	65	39	30	77	28	123	63,08
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	0	100	100	100	100		
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	14	0	2	2	100	4	6	42,86
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	0	100	100	100	100		
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	2000	1561	400	510	128	400	2.471	123,55
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	3	3	3	3	100	3	9	300,00
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60	24	12	12	100	12	48	80,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100		
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	3	3	3	3	100	3	9	300,00
		Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	30	33	27	27	100	27	87	290,00
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	7	7	7	7	100	7	21	300,00
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	5	1	1	1	100	1	3	60,00
8.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	0	100	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 /4)
8.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Promosi pelayanan Publik Perangkat Daerah	5	2	2	0	0	0	2	40,00
8.01.02	Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	2	0	2	2	2	2		
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	100	0	100	100	100	0		
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan	300	200	75	75	100	200	475	158,33
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Rakor Tim FKUB	40	19	4	4	100	8	31	77,50
		Jumlah Fasilitasi Pembentukan FPK Kab/Kota	10	1	0	0	0	10	11	110,00
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman etika dan budaya politik &	100	25	25	25	100	25		
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan danPartaiPolitik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Pembinaan Politik Daerah	100	28,60	14,3	0	-	28,60		

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 /4)
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Pemantapan Etika Politik	840	372	0	0	-	0	372	44,29
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rakor Tim Ranham & Laporan RANHAM	20	1	0	0	-	4	5	25,00
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bimbingan Teknis Pengelolaan bantuan Keuangan Partai Politik	1	0	0	0	-	1	1	100,00
		Diskusi Politik	6	3	0	0	-	2	5	83,33
		Jumlah Parpol yang mendapatkan Bantuan	11	11	11	11	100	11	33	300,00
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase lembaga demokrasi yang dilegalisasi	26,4	0	6,60	6,87	104,09	100	107	404,81
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase LSM yang sudah terdaftar	100	0	100	75	75,00	100	175	175,00

8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi	Kopi Bareng	3	0	0	0	0	1	1	33,33
		Pembinaan dan Pengawasan	30		14	14	100	6	20	66,67
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Pencegahan Penyakit Masyarakat	100	0	6,67	0		100,00		
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase Pencegahan Penyakit Masyarakat	100	0	100	14,2	14,2	31.11		
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan	Jumlah Laporan Rakor TIM BNK	60	14	7	1	14	10	25	41,67
		Jumlah Peserta Kaderisasi,	1500	450	0	0	0	15	465	31,00
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan kejadian terkait konflik sosial	100	0	100	100	100	28,57		
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah meningkatnya Kewaspadaan daerah	100	100	14,28	2,4	16,81	100		
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Rakor Tim Kewaspadaan Dini	45	24	5	5	100	12	41	91,11
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Rakor FKDM	60	0	0	0	-	12	12	20,00
		Jumlah Petugas PAMHARKAMTIB MAS	125	25	25	25	100	25	75	60,00

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 :

1. Kegiatan tidak dilaksanakan hal ini disebabkan pada saat itu adanya pandemi covid 19 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan
2. Dampak pandemi penyerapan anggaran yang belum maksimal

Kebijakan / tindakan penganggaran untuk solusi permasalahan :

1. Melakukan rasionalisasi anggaran kembali terhadap kegiatan-kegiatan yang Realisasi penyerapan anggarannya belum maksimal namun kalau dilihat dari target kinerja tercapai.
2. Melakukan evaluasi secara konsisten terhadap penyerapan anggaran masing-masing kegiatan dengan mengacu kepada anggaran kas yang telah direncanakan.

1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bakesbang & Politik Kabupaten

Sampang

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, berdasarkan Revisi RPJMD Kabupaten Sampang 2019-2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang berperan melaksanakan Misi 5 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan capaian program dan kegiatan sebagaimana target dan realisasi indikator sasaran seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Presentase Konflik sosial politik yang diselesaikan			100	100	100	100	85,71	85,71	100	100	

2 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategik yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu-isu Penting tersebut dapat berupa Informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

Isu permasalahan strategis yang dapat diambil dengan memperhatikan situasi kondisi yang berkembang saat ini antara lain:

1. Masyarakat yang rentan terhadap isu – isu negatif,
2. Kurang optimalnya penguatan karakter bangsa dan empat konsensus nasional,
3. Belum maksimalnya partisipasi politik masyarakat,
4. Masih maraknya penyalahgunaan Narkotika.
5. Masih terjadinya fluktuasi partisipasi politik;
6. Kurangnya tingkat kepedulian / sikap apatis masyarakat

Lemahnya jaringan koordinasi antara aparat dan instansi/lembaga pemantau di lapangan, serta belum adanya aplikasi pelaporan terpadu

Dalam menganalisis dan menyikapi pengaruh lingkungan tersebut dapat digunakan analisis SWOT yaitu (strengths, weaknesses, opportunities, treaths). Dengan penjelasan bahwa lingkungan internal organisasi terdiri dari dua faktor strategis yaitu kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) organisasi, sedangkan lingkungan eksternal organisasi yaitu peluang (opportunities) dan ancaman/tantangan (treaths). Analisis tersebut digunakan Badan Kesatua Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam mengatasi kelemahan dan menanggulangi ancaman serta untuk memperkuat, meningkatkan dan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dengan identifikasi sbb :

Lingkungan Internal

- Kekuatan (Strengths) :
 1. Peraturan Peraturan Bupati Sampang No. 58 Tahun 2008 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Sampang mempunyai tugas pokok : “ Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan, Serta Melakukan Pembinaan, Koordinasi, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri “
 2. Penyediaan anggaran kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jatim; Adanya akses yang baik kepada Infra struktur politik dan supra struktur politik;
 3. Tersedianya Sumber Daya Manusia;
 4. Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral.

- Kelemahan (Weaknesses) :
 1. Kompetensi Sumber daya Aparatur yang belum optimal;
 2. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
 3. Peran Bakesbangpol secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang kurang dikenal masyarakat;
 4. Job discription yang kurang tepat dan kurang jelas yang sering kali overlapping (tumpang tindih) dengan Badan/Dinas lain.

Lingkungan Eksternal

- **Peluang (opportunities) :**
 1. Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra struktur politik dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan, Demokrasi dan HAM.
 2. Partisipasi Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.
- **Ancaman (treaths) :**
 1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;
 2. Keraguan masyarakat terhadap netralitas seorang PNS;
 3. Relatif tingginya potensi konflik dimasyarakat (horizontal, vertikal dan SARA).

Strategi

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang ditetapkan sebagai berikut :

1. Memberdayakan kebhinekaan Indonesia dan peningkatan pemahaman Etika berbangsa dan Bernegara.
2. Memelihara dan menghormati komunitas kehidupan politik yang berorientasi pada pengembangan masyarakat madani yang dicita-citakan.
3. Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban Peningkatan pemahaman HAM di jajaran aparaturn pemerintah dan masyarakat
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban.
5. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan.
6. Mengembangkan kreatifitas masyarakat dengan memberikan dorongan kearah kehidupan politik yang menghormati HAM, berkeadilan, bertanggungjawab dan mampu berkompetisi secara sehat dan dinamis.
7. Meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam mewujudkan stabilitas politik di Kabupaten Sampang.

8. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta partai politik tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilu dan partai politik

Strategi di atas, merupakan acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, merumuskan cara pencapaiannya yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2023 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 dengan kebutuhan riil Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Sampang

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					6.889.283.376	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					8.222.678.612	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sampang	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	3.112.627.151	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sampang	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	2.979.903.236			
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sampang	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	12.731.291	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sampang	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	5.187.316			
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sampang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.559.496	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sampang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	308.688			
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sampang	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.720.094	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sampang	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.909.990			
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sampang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.144.780	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sampang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	985990			
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Sampang	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	738.504	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Sampang	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	669.740			
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sampang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	450.441	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sampang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	709.740			
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sampang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.117.976	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sampang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	603.168			

8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sampang	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	2.646.440.622	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sampang	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	2.515.092.874	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sampang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bu	2.645.038.910	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sampang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bu	2.514.744.139	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sampang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.010.308	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sampang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	169.641	
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sampang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	391.404	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sampang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	179.094	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sampang	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sampang	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	19.336.000	
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sampang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sampang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	19.336.000	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sampang	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	134.249.872	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sampang	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	134.249.872	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sampang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.846.590	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sampang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.745.084	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sampang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.896.610	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sampang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.086.631	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sampang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.176.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sampang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.541.957	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sampang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.559.770	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sampang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.778.200	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sampang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	4.224.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sampang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	1.800.000	
8.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Sampang	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan	4.752.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Sampang	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan	4.000.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sampang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	73.574.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sampang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	74.298.000	

8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sampang	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	24.915.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sampang	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	13.500.000	
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sampang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	24.915.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sampang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	13.500.000	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sampang	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	119.172.206	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sampang	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	119.172.206	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sampang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	359.170	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sampang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.416.286	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sampang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	69.031.512	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sampang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	62.755.920	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sampang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	79.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sampang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	54.000.000	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sampang	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	152.193.160	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sampang	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	150.439.968	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sampang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	49.610.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sampang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	45.450.000	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sampang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	13.860.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sampang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	19300000	
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sampang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	88.723.160	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sampang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	85.689.968	
8.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Sampang	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	22.925.000	Penataan Organisasi	Sampang	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	22.925.000	
8.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sampang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	25.217.500	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sampang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	22.925.000	

8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sampang	Jumlah Kelompok yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	2 Kelompok	301.590.198	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sampang	Jumlah Kelompok yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	2 Kelompok	499.998.861	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	Sampang	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	100%	301.590.198	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	Sampang	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	100%	499.998.861	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sampang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1500 org	117.003.528	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sampang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1500 org	249.999.458	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sampang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	62 org	184.586.670	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sampang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	62 org	249.999.403	

8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Sampang	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman etika dan budaya politik &	100%	1.682.136.535	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Sampang	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman etika dan budaya politik &	100%	2.763.299.153	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Sampang	Prosentase Pembinaan Politik Daerah	100%	1.682.136.535	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Sampang	Prosentase Pembinaan Politik Daerah	100%	2.763.299.153	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Sampang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	186 Orang	15.575.734	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Sampang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	186 Orang	187.158.680	
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sampang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	216 Orang	146.691.874	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sampang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	216 Orang	79.266.466	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sampang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 Laporan	1.519.868.927	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sampang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 Laporan	2.496.874.007	

8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Sempang	Persentase lembaga demokrasi yang dilegalisasi	1	227.447.716	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Sempang	Persentase lembaga demokrasi yang dilegalisasi	100%	75.865.615	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Sempang	Prosentase LSM yang sudah terdaftar	1	227.447.716	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Sempang	Prosentase LSM yang sudah terdaftar	100%	75.865.615	
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sempang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	70 Orang	227.447.716	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sempang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	70 Orang	75.865.615	
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Sempang	Cakupan Pencegahan Penyakit Masyarakat	1	146.231.280	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Sempang	Cakupan Pencegahan Penyakit Masyarakat	100%	175.955.160	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Sempang	Prosentase Pencegahan Penyakit Masyarakat	1	146.231.280	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Sempang	Prosentase Pencegahan Penyakit Masyarakat	100%	175.955.160	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sempang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 Orang	146.231.280	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sempang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 Orang	175.955.160	

8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasioanal dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Sampang	Persentase penurunan kejadian terkait konflik sosial	100%	1.419.250.496	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasioanal dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Sampang	Persentase penurunan kejadian terkait konflik sosial	100%	1.727.656.587	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Sampang	Prosentase meningkatnya Kewaspadaan daerah	100%	1.419.250.496	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Sampang	Prosentase meningkatnya Kewaspadaan daerah	100%	1.727.656.587	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sampang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	221.111.950	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sampang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	513.314.180	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sampang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	1.198.138.546	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sampang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	1.214.342.407	

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2023 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2023.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 Kabupaten Sampang

Perangkat Daerah: Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NIHIL		

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Bappelitbangda pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada perencanaan pembangunan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang adalah nihil.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2023 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah **(RKP) Tahun 2023** dengan Tema **“ Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat melalui penguatan kontribusi sektor unggulan, kesehatan, dan infrastruktur menuju Sampang Hebat Bermartabat ”**

Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten Sampang Tahun 2023

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Sampang
Prioritas Pembangunan 1: Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Pembangunan 1: Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata	Prioritas Pembangunan 2: Pemantapan pemulihan ekonomimelalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah
Prioritas Pembangunan 2: Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas Pembangunan 2: Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Prioritas Pembangunan 1: Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
Prioritas Pembangunan 3: SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, serta Pengentasan Kemiskinan	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan ketahanan sosial masyarakat melalui pengentaskan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan serta sarana dan prasarana dasar
Prioritas Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Pembangunan 4: Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat
Prioritas Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Prioritas Pembangunan 2: Pemantapan pemulihan ekonomimelalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah

Prioritas Pembangunan 6: Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas Pembangunan 6: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup	Prioritas Pembangunan 1: Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
Prioritas Pembangunan 7: Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Pembangunan 7: Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Prioritas Pembangunan 4: Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasidan inovasi daerah. dan Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat

Sumber: RKPD Kabupaten Sampang, 2022

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2020 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Bakesbang dan Politik yang telah dituangkan dalam Renstra Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Bakesbang dan Politik pada Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2023

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2023
	Tujuan:			
1	Meningkatnya ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	1	Prosentase Penurunan Konflik Sosial Politik	100,00
	Sasaran:			
1	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial politik	1	Prosentase Konflik sosial politik yang diselesaikan	100,00

3

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2022

Dalam merumuskan program kegiatan Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian **misi 5** yaitu “ **Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu** ”. Program

aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 5 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran “ **Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik**”.

Adapun program-program yang mendukung pada sasaran tersebut, yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasioanal dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program-program diatas kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2022.

C. Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan sebagai berikut:

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Sampang**

BAKESBANG DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rancangan Awal RKPD 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN				6.628.735.004			UNSUR	7.720.772.683
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	Sampang	100%	2.965.926.220	APBD		100%	3.297.190.644
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	Sampang	100%	4.774.000	APBD		100%	5.251.400
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sampang	2 Dokumen	82.500	APBD		2 Dokumen	90.750
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sampang	1 Dokumen	1.980.000	APBD		1 Dokumen	2.178.000
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sampang	1 Dokumen	1.815.000	APBD		1 Dokumen	1.996.500
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sampang	1 Dokumen	440.000	APBD		1 Dokumen	484.000
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sampang	1 Dokumen	412.500	APBD		1 Dokumen	453.750
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sampang	2 Laporan	44.000	APBD		2 Laporan	48.400
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	Sampang	100%	2.661.597.424	APBD		100%	2.927.757.166
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sampang	22 Orang/bu	2.661.329.299	APBD		22 Orang/bu	2.927.462.229

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rancangan Awal RKPD 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sampang	1 Laporan	169.125	APBD		1 Laporan	186.038
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sampang	17 Laporan	99.000	APBD		17 Laporan	108.900
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Sampang	100%	100.532.590	APBD		100%	134.249.872
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sampang	1 Paket	4.145.084	APBD		1 Paket	4.559.592
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sampang	2 Paket	5.286.631	APBD		2 Paket	5.815.294
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sampang	1 Paket	21.629.675	APBD		1 Paket	23.792.643
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sampang	1 Paket	12.503.200	APBD		1 Paket	13.753.520
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Sampang	365 Dokume	1.800.000	APBD		365 Dokume	1.980.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rancangan Awal RKPd 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sampang	10 Laporan	900.000	APBD		10 Laporan	990.000
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sampang	38 Laporan	54.268.000	APBD		48 Laporan	59.694.800
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Sampang	100%	9.000.000	APBD		100%	9.900.000
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sampang	3 Unit	9.000.000	APBD		3 Unit	9.900.000
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Sampang	100%	119.172.206	APBD		100%	119.172.206
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sampang	12 Laporan	206.882	APBD		12 Laporan	227.570
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sampang	12 Laporan	65.730.000	APBD		12 Laporan	72.303.000
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sampang	12 Laporan	54.000.000	APBD		12 Laporan	59.400.000
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Sampang	100%	70.850.000	APBD		100%	77.935.000
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sampang	30 Unit	55.100.000	APBD		30 Unit	60.610.000
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sampang	30Unit	15750000	APBD		30Unit	17.325.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rancangan Awal RKPD 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
8.01.02	Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	Sampang	2 Kelompok	166.145.041	APBD		2 Kelompok	182.759.545
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	Sampang	100%	166.145.041	APBD		100%	182.759.545
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sampang	100 org	166.145.041	APBD		1500 org	182.759.545
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman etika dan budaya politik &	Sampang	100%	1.911.256.028	APBD		100%	2.496.874.007
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan danPartaiPolitik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Pembinaan Politik Daerah	Sampang	100%	1.911.256.028	APBD		100%	2.496.874.007
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sampang	11 Laporan	1.911.256.028	APBD		11 Laporan	2.496.874.007

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rancangan Awal RKPD 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Pencegahan Penyakit Masyarakat	Sampang	1	30.630.920	APBD		100%	33.694.012
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase Pencegahan Penyakit Masyarakat	Sampang	1	30.630.920	APBD		100%	33.694.012
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sampang	20 Orang	30.630.920	APBD		20 Orang	33.694.012

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang mengampu urusan Unsur Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Program - program Bakesbang dan Politik pada Tahun 2023 mendukung prioritas pembangunan “**Prioritas 5. “Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat ”**sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Bakesbang dan Politik dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Bakesbangpol Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN			6.662.452.286
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	2.999.643.502
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	4.774.000
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	82.500
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.980.000
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.815.000
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	440.000
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	412.500
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	44.000
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	2.661.597.424
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bu	2.661.329.299
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	169.125
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	99.000
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	134.249.872
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.145.084
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.286.631
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.629.675
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.503.200
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokume	1.800.000
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	900.000
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	54.268.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	9.000.000
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	9.000.000
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	119.172.206
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	206.882
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	65.730.000
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	54.000.000
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	70.850.000
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	55.100.000
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	15750000
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	2 Kelompok	166.145.041
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	100%	166.145.041
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1500 org	166.145.041
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman etika dan budaya politik &	100%	1.911.256.028

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Pembinaan Politik Daerah	100%	1.911.256.028
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 Laporan	1.911.256.028
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Pencegahan Penyakit Masyarakat	1	30.630.920
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase Pencegahan Penyakit Masyarakat	1	30.630.920
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 Orang	30.630.920

Pada Tahun 2023 Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang akan melaksanakan Urusan Unsur Penunjang lainnya dengan total anggaran Rp. 6.628.735.004,00 Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 1 urusan, 5 program dan 10 kegiatan serta 27 Sub Kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang.

Inovasi dalam rangka Mendukung Program dan Kegiatan Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2023

NAMA INOVASI	URAIAN	Bidang
SIKAT (Sistim Komunikasi Masyarakat)	<p>Latar Belakang: Dalam rangka mendukung Misi Bupati ke 5 yaitu mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu, mak aguna meminimalisir kejadian di wilayah Kabupaten Sampang diperlukan informasi yang cepat dan sebanyak banyaknya sehingga diperlukan jaringan yang dapat memberikan informasi kepada Bupati. Untuk itu perlu sistim komunikasi masyarakat dalam rangka deteksi dini dan cegah dini</p> <p>Tujuan: Untuk Memperoleh informasi sebanyak banyaknya tentang situasi dan kondisi di Kabupaten Sampang.</p> <p>Manfaat: Memberikan saran dan masukan terkait situasi dan kondisi di Kabupaten Sampang kepada Bupati</p> <p>Hasil Inovasi: Meminimalisir kejadian yang dapat mengganggu stabilitasi di Kabupaten Sampang</p>	Bidang Kewaspadaan
"SILAT LIDAH (Silaturahmi Lini terdepan dan harmonisasi) "	<p>Latar Belakang Dalam rangka mendukung Misi Bupati ke 5 yaitu mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu, maka guna menjalin silaturahmi dan keakraban antara Pemerintah abupaten Sampang dan Ormas / LSM perlu adanya pembinaan dan pendekatan pemerintah kepada Ormas dan LSM, sehingga ada kegiatan kunjungan ke Kantor/sekretariat Ormas dan LSM</p> <p>Tujuan Melakukan pembinaan kepada Ormas dan LSM sebagai mitra kerja pemerintah untuk bersama sama membangun Kabupaten Sampang hebat bermartabat</p>	

	<p>Manfaat: Ormas dan LSM membantu Pemerintah Kabupaten Sampang untuk menginformasikan hasil hasil pembangunan kepada masyarakat</p> <p>Hasil Inovasi : Masyarakat dapat mengetahui dan menikmati hasil pembangunan di Kabupaten Sampang</p>	
<p>“KOPI PANAS (Komitmen dan Implementasi Patriotisme dan Nasionalisme)”</p>	<p>Latar Belakang : Dalam rangka mendukung Misi Bupati ke 5 yaitu mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu, di era modern dan globalisasi masyarakat meninggalkan kecintaan tanah air, maka guna meningkatkan rasa patriotis medan nasionalisme kepada masyarakat perlu adanya suatu kegiatan untuk mendengarkan dan mengumandangkan serta mengadakan lomba lagu lagu perjuangan</p> <p>Tujuan : Meningkatkan rasa patriotisme dan nasionalisme di kalangan masyarakat Kabupaten Sampang</p> <p>Manfaat : Menumbuhkan rasa kecintaan terhadap Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, NKRI,dan Bhineka Tunggal Ika</p> <p>Hasil Inovasi : Mempertebal rasa dan nilai nilai luhur kebangsaan dan menghargai jasa para Pejuang Pahlawan</p>	
<p>“Mekar Butik (Membangun Karakter Berbudaya Politik)”</p>	<p>Latar Belakang : Dalam rangka mendukung Misi Bupati ke 5 yaitu mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu, maka dalam rangka memberikan pendidikan dan berbudaya politik kepada pemilih pemula di Kabupaten Sampang, perlu dilaksanakan simulasi Mekar Butik</p> <p>Tujuan : Agar Para pemilih pemula mendapatkan pendidikan politik yang berbudaya dan beretika yang baik</p> <p>Manfaat : Para pemilih pemula menyampaikan aspirasi politiknya sesuai dengan budaya dan etika berpolitik.</p>	
	<p>Hasil Inovasi : Penyelenggaraan demokrasi di Kabupaten Sampang semakin lebih baik</p>	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 haruslah konsisten dan selaras dengan yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Adapun tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang adalah “ **Meningkatkan penyelesaian konflik sosial politik** ” yang didukung oleh satu sasaran yaitu: **Menurunnya Konflik Sosial.**

Pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan melaksanakan Urusan Pemerintahan fungsi penunjang lainnya dengan total anggaran Rp. 6.695.188.066,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 6 Program dan 13 kegiatan serta 34 Sub. Kegiatan.** Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan lingkup Kabupaten Sampang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2023, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;

3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI